BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan menjadi sektor yang sangat penting bagi Kemajuan Negara, karena maju tidaknya suatu negara dapat dilihat dari Bidang Pendidikannya. Dalam konteks Indonesia sendiri, masih terdapat banyak tantangan dan hambatannya termasuk masalah putus Sekolah. Kebijakan Wajib Belajar di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 yang bertujuan untuk meningkatkan akses Pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak, mengembangkan potensi diri, membantu anak-anak hidup mandiri, meningkatkan kualitas penduduk dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar paling utama yang bersifat terbuka, sebab suatu pendidikan tidak dapat berjalan sesuai fungsinya apabila mengisolasikan diri dengan lingkungannya. Pendidikan berada di masyarakat, ia adalah milik masyarakat. Itulah sebabnya, pemerintah menegaskan bahwa pendidikan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah/sekolah, orang tua dan masyarakat. Oleh karena keberadaan pendidikan seperti itu maka apa yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat akan berpengaruh pula terhadap Pendidikan, Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan

kemampuan didalam maupun diluar sakolah dan berlangsung seumur hidup.

Namun pada kenyataanya kondisi ekonomi masyarakat tentu saja berbeda, tidak semua keluarga memiliki kemampuan yang memadai dan mampu memenuhi segala kebutuhan keluarga. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan oleh kondisi ekonomi yang seperti ini adalah orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya pada jenjang yang lebih tinggi walaupun mereka mampu membiayai di tingkat sekolah dasar. Jelas bahwa kondisi ekonomi keluarga merupakan faktor pendukung yang paling besar kelanjutan Pendidikan anak-anaknya, sebab Pendidikan juga membutuhkan dana.

Banyak faktor yang menyebabkan anak putus sekolah, baik dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri Anak, baik berupa kemalasan, hobi bermain, kurangnya kesadaran akan pentingnya Pendidikan, masalah pribadi seperti masalah kesehatan, kehamilan, penyalahgunaan zat, kesehatan mental/trauma yang menyebabkan putus sekolah. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri anak baik berasal dari orangtua atau lingkungan sosial yakni keadaan ekonomi keluarga, hubungan orangtua yang kurang harmonis, latar belakang Pendidikan orangtua dan lingkungan pergaulan, akses jalan menuju sekolah, perkembangan media digital sehingga menyebabkan dorongan anak untuk bersekolah juga rendah.

Berdasarkan Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS) yang dikembangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, Anak Tidak Sekolah (ATS) didefinisikan sebagai anak usia SD/MI sederajat (7-12 tahun), sekolah SMP/MTs sederajat (13-15 tahun), dan SMA/SMK/MA sederajat (16-18 tahun) yang:

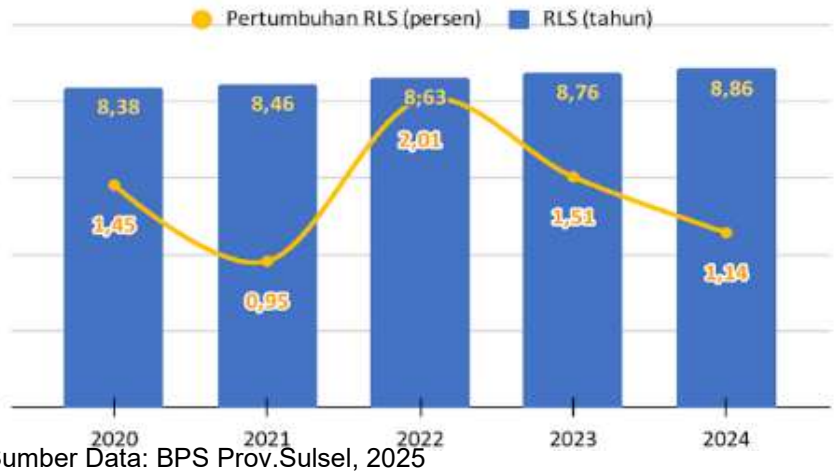
1. Tidak pernah bersekolah;
2. Putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah ketika sedang berada di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/SMK/MA sederajat);
3. Putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (tidak transisi dari jenjang SD/MI sederajat ke jenjang SMP/MTs sederajat atau dari jenjang SMP/MTs sederajat ke jenjang SMA/SMK/MA sederajat). Adapun Anak yang dikategorikan berisiko putus sekolah (ABPS) adalah anak dan remaja yang masih bersekolah namun memiliki kerentanan untuk putus sekolah karena memiliki satu atau sejumlah faktor risiko.

Rata rata Lama sekolah (RLS) dan Harapan Lama sekolah (HLS), Salah satu Dampak dari Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana meningkatkan kedua indikator utama sektor Pendidikan. Kedua indikator ini memberikan kontribusi yang sangat besar pada pencapaian IPM. Berdasarkan data BPS bahwa perhitungan ke dua indikator ini dimulai pada usia 25 tahun ke atas untuk angka rata rata lama sekolah dimana diharapkan semua warga sudah menyelesaikan jenjang pendidikan yang

ditamatkan sedangkan usia 7 tahun untuk angka harapan lama sekolah dimana menghitung lamanya pendidikan yang ditempuh dari penduduk yang berusia 7 tahun ke atas. Rata rata lama sekolah dapat memberikan gambaran rata rata tingkat pendidikan yang ditamatkan pada suatu daerah. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 menunjukkan bahwa HLS dan RLS di Sulawesi Selatan sejak tahun 2020 hingga 2024 meningkat, namun mengalami pertumbuhan yang lambat.

berdasarkan grafik Tren pertumbuhan rata-rata lama sekolah mengalami perlambatan selama 2 tahun terakhir. RLS sempat tumbuh sebesar 2,01 persen di tahun 2022, namun terus melambat dengan pertumbuhan terakhir sebesar 1,14 persen pada tahun 2024 dengan angka RLS sebesar 8,86 tahun. Artinya rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Sulawesi Selatan adalah selama 8,86 tahun atau setara dengan jenjang SMP kelas VIII dapat dilihat pada Gambar 1.

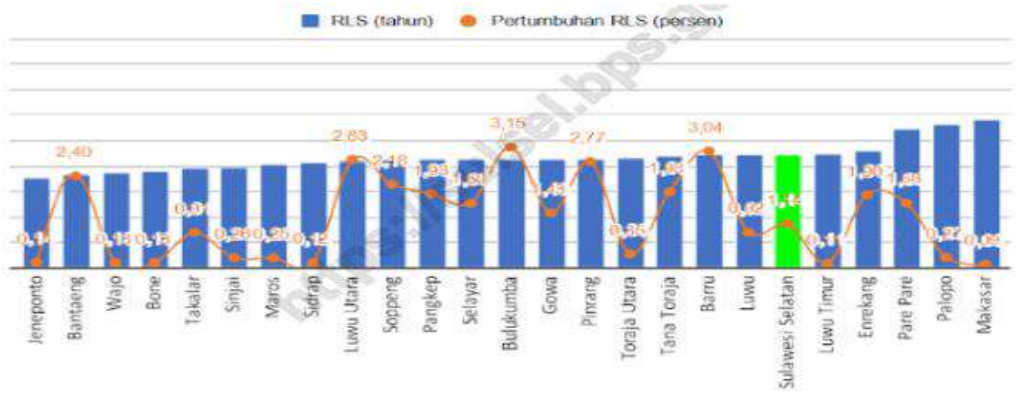
Gambar 1
Grafik Tren Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Sulawesi Selatan tahun 2020-2024



Sumber Data: BPS Prov.Sulsel, 2025

Sementara untuk kabupaten/kota ada yang tergolong pertumbuhan tinggi dan rendah sebagaimana terlihat pada grafik Gambar 2 di bawah ini:

Gambar 2
Grafik Pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tahun 2024



Sumber Data: BPS Prov.Sulsel, 2025

Pertumbuhan RLS tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bulukumba sebesar 3,15 persen. RLS di 12 Kabupaten lainnya juga tumbuh tinggi lebih dari 1 persen di tahun 2024. Sedangkan pertumbuhan RLS paling rendah terjadi di Kota Makassar yang hanya sebesar 0,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian RLS paling tinggi pada tahun 2024 adalah Kota Makassar sebesar 11,57 tahun. Dua kota lainnya yang mencapai angka RLS di atas 10 tahun yaitu Kota Palopo (11,57) dan Kota Pare-pare (10,88). Artinya penduduk usia 25 tahun ke atas yang tinggal di ketiga kota ini rata-rata telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA kelas XI. Sedangkan RLS terendah pada tahun 2024 adalah Kabupaten Jeneponto sebesar 7,01 tahun yang artinya penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Jeneponto

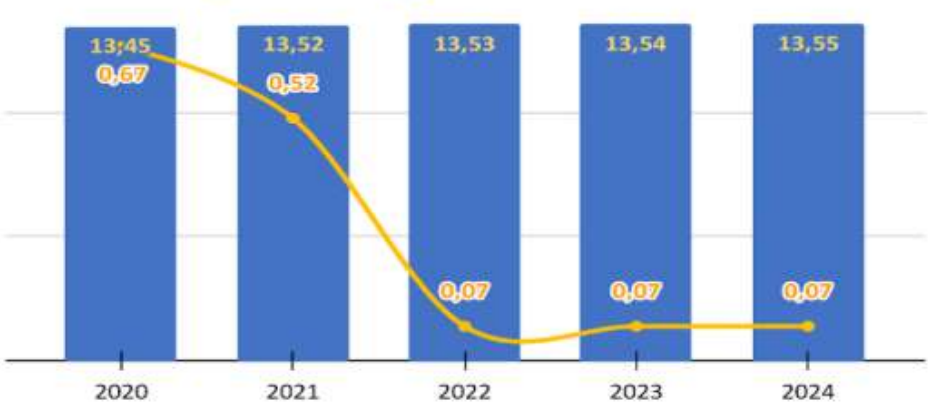
rata-rata telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP kelas VII. Kondisi ini menunjukkan sebagian penduduk tidak menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun dengan tuntas.

Gambaran tersebut diatas memperlihatkan penduduk tidak menyelesaikan pendidikan yang diwajibkan hingga 12 tahun dan memilih untuk putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka partisipasi sekolah terlihat belum mencapai 100% untuk semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA)

Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah pendidikan kepala keluarga, pendapatan kepala keluarga, tingkat kemiskinan, PDRB, infrastruktur, sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai dan belum merata, jarak tempuh sekolah, beban ketergantungan, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, budaya mempekerjakan anak, dan ketidakmampuan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran.

Harapan Lama Sekolah yang merupakan salah satu dimensi pengetahuan memperlihatkan pertumbuhan yang lambat. Harapan Lama Sekolah (HLS) Sulawesi Selatan tumbuh stagnan sebesar 0,07 persen selama 3 tahun berturut-turut.

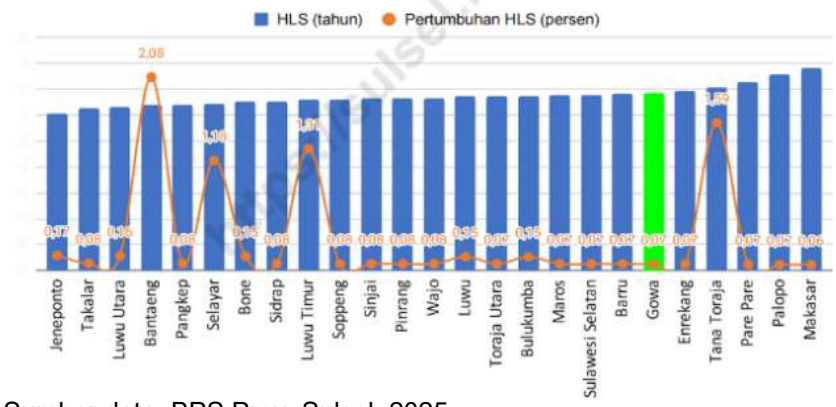
Gambar 3
Grafik Tren Harapan Lama Sekolah (HLS) di Sulawesi Selatan



Sumber data: BPSD Prov.Sulsel 2025

Berdasarkan Grafik pada Gambar 3 menunjukkan bahwa pada tahun 2020−2024, harapan lama sekolah mengalami pertumbuhan positif namun dengan tren perlambatan pertumbuhan pada 4 tahun terakhir ini. Pada tahun 2022−2024, HLS tumbuh stagnan di angka 0,07 persen setiap tahunnya atau masih mengalami pertumbuhan paling rendah sejak tahun 2020. Hal yang serupa terjadi juga pada level kabupaten/kota.

Gambar 4
Grafik Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS)
Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tahun 2024



Sumber data: BPS Prov. Sulsel, 2025

Berdasarkan Grafik Gambar 4, Hanya terdapat 4 kabupaten yang pertumbuhan HLS nya lebih dari 1 persen dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan HLS Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Bantaeng, Tana Toraja, Luwu Timur, dan Selayar. Capaian HLS paling tinggi dicapai oleh Kota Makassar dan yang paling rendah ada di Kabupaten Jeneponto dengan perbedaan keduanya sebesar 3,48 tahun. Hal ini berarti penduduk usia 7 tahun ke atas di Kota Makassar diharapkan dapat bersekolah selama 15,62 tahun setara menyelesaikan Diploma 3, sedangkan penduduk 7 tahun ke atas di Jeneponto diharapkan dapat bersekolah selama 12,14 tahun atau masih setara dengan lulus SMA sederajat. Pertumbuhan HLS yang lambat dibarengi juga dengan pertumbuhan RLS yang juga lambat.

Anak tidak sekolah (ATS) terdiri atas anak yang belum pernah bersekolah, anak yang Putus Sekolah dan anak yang lulus pada satu atau dua jenjang pendidikan tetapi tidak lanjut pada jenjang berikutnya.

Gambar 5
Grafik Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Kelompok Usia di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2024

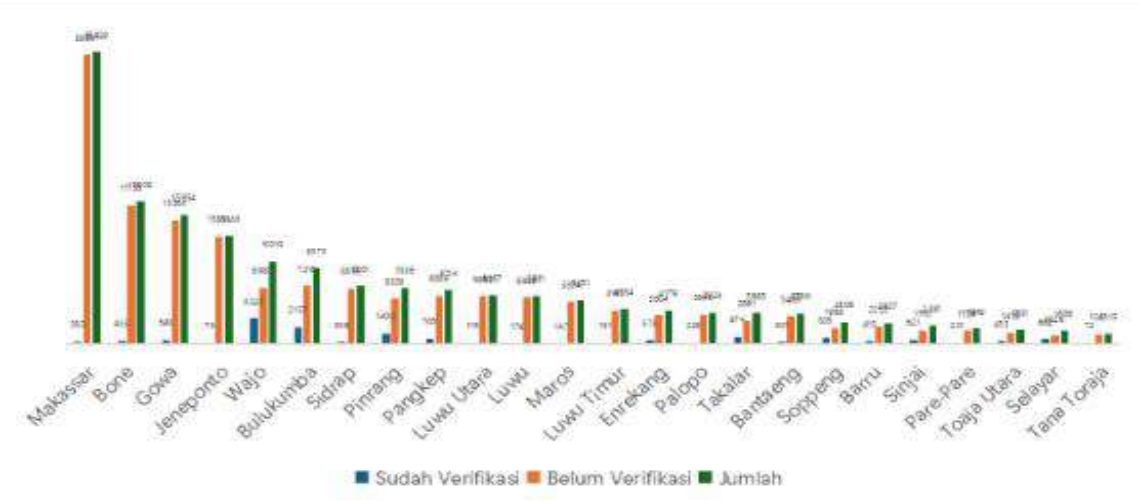


Sumber Data: BPS Prov. Sulsel 2024 dan 2025

Dari Gambar 5 Hasil survei BPS diatas menunjukkan bahwa anak tidak sekolah usia 16-18 tahun lebih tinggi dibanding kelompok usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun. Hal ini telah menjadi salah satu prioritas pemerintah sebab mempengaruhi keberhasilan Indonesia dalam mencapai Indonesia Emas 2045.

Selain hasil survei, untuk memperoleh angka *absolut* atau data *by name by address* dan *real time* yang akan digunakan untuk melaksanakan intervensi terhadap sasaran ATS, maka Pusat Data dan Informasi merilis data Verval ATS Kemdikbud yang juga menunjukkan jumlah ATS di Sulawesi Selatan cukup tinggi terutama kelompok usia 16-18 tahun. Kondisi tanggal 5 Maret 2025 menunjukkan bahwa jumlah ATS di Sulawesi Selatan sebanyak 175.656 orang dan yang telah diverifikasi baru mencapai 15.262 orang (8,69%), sedangkan yang belum diverifikasi 160.394 (91,31%) orang.

Gambar 6
Grafik Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Data Pusdatin Kemendikbud tanggal 5 Maret 2025



Sumber Data: Pusdatin Kemendikbud,2025

Berdasarkan Grafik diatas, Kota Makassar merupakan penyumbang ATS tertinggi (36.029 orang), disusul Bone (17.609 orang), Gowa (15.954 orang) dan Jeneponto (13.340 orang). terdapat alasan atau penyebab Anak Tidak Bersekolah yang harus diintervensi sehingga ATS dapat kembali bersekolah.

Di tengah kompleksitas permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Sulawesi Selatan, upaya pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial menunjukkan komitmen yang kuat dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Salah satu inisiatif strategis yang dicanangkan adalah Program "Sekolah Rakyat". Program ini secara spesifik ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang masuk dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), memberikan mereka akses pendidikan berasrama lengkap dengan fasilitas pendukung seperti ruang kelas, perpustakaan, asrama siswa dan guru, hingga lapangan olahraga, tanpa persyaratan tes akademik. Komitmen ini diwujudkan dengan penetapan beberapa lokasi di Sulawesi Selatan sebagai pusat penyelenggaraan Sekolah Rakyat, termasuk Sentra Wirajaya dan BBPPKS Makassar, serta gedung milik BPSDM Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mendapatkan dukungan penuh dari Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Selain di Makassar, program ini juga akan diperluas ke Takalar dan Gowa, menjadikan total empat titik di Sulawesi Selatan yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat mulai tahun ajaran 2025/2026. Kehadiran inisiatif ini, yang merupakan bagian dari

53 titik Sekolah Rakyat yang ditetapkan secara nasional dan menempatkan Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah prioritas, menegaskan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi generasi tangguh melalui pendidikan, Pencanangan Sekolah Rakyat ini menjadi indikator penting dalam upaya percepatan penanganan ATS di Sulawesi Selatan. Sekolah Rakyat menunjukkan adanya dukungan kebijakan dan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh Tim Koordinasi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, efektivitas kinerja tim dalam mengidentifikasi, memfasilitasi, dan mengintegrasikan anak-anak ATS ke dalam program-program seperti Sekolah Rakyat ini menjadi krusial dalam mencapai tujuan penuntasan ATS secara komprehensif.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah berkomitmen untuk mengatasi permasalahan anak tidak sekolah melalui pelaksanaan Program Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 71 tahun 2020 tentang Program Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) Provinsi Sulawesi Selatan dan juga terintegrasi ke dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

Program Penanganan Anak tidak sekolah disusun dengan mengacu pada salah satu Strategi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014,

Dilandasi oleh Peraturan Gubernur Sulsel No. 71 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan ATS, Pemerintah Provinsi Sulsel kemudian Mengembangkan Inovasi Percepatan Penanganan ATS Berbasis Aksi Kolaborasi (Pasti Beraksi).

Pasti Beraksi menjadi wadah Kerjasama Lintas Sektor dengan membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanganan anak tidak sekolah yang dikoordinir oleh Bappelitbangda dan melibatkan Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DP3A, Diskominfo, UPTD Cabang Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pertanian dan Peternakan, Kementerian Agama, serta sektor swasta khususnya melalui Forum CSR. Pelaksanaan Pasti Beraksi dikoordinir oleh Tim Percepatan Penanganan ATS (PP-ATS) tingkat provinsi yang merupakan tim lintas sektor yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Perguruan Tinggi, dan lembaga sosial masyarakat. Tim PP-ATS dibentuk untuk menjadi wadah dalam mengkoordinasikan, mensinergikan, merencanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan aksi-aksi nyata terkait percepatan penanganan ATS. Tim serupa diharapkan dapat juga dibentuk di semua tingkatan (kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan) dan pemberian nama tim dapat disesuaikan dengan tingkatan wilayah serta kearifan lokal masing-masing daerah.

Dalam hal ini, Tim Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah Telah melakukan Koordinasi pelaksanaan Program Penanganan ATS. Namun pada kenyataanya, terdapat beberapa kendala yang dialami saat ini mulai

dari pendataan sampai ke pengembalian ATS ke Bangku Sekolah, misalnya sampai sekarang Dinas Pendidikan masih kewalahan dalam melakukan verifikasi, hingga saat ini hanya sekitar 9% data terverifikasi, masih terdapat 91% Belum Terverifikasi, pengembalian ATS ke Bangku Sekolah yang masih lambat dikarenakan kolaborasi antar OPD belum Optimal dalam hal ini SDM Pengelola ATS belum optimal, berikut dibawah ini menunjukan Tabel Data Verifikasi ATS ke bangku sekolah.

Gambar 7 Update Data Verifikasi ATS



Sumber: SIPBM PASTI BERAKSI

Berdasarkan Gambar 7 update verifikasi ATS, teridentifikasi sejumlah 16.094 anak Yang terdaftar sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS). Selain itu terdapat 166.991 anak yang tercatat dalam kategori Anak Beresiko Putus Sekolah (ABPS). Meskipun terdapat jumlah yang cukup besar dari kedua kelompok tersebut, hanya sebanyak 1.466 anak yang berhasil kembali melanjutkan pendidikan mereka setelah terdeteksi sebagai Anak Tidak Sekolah.

Salah satu faktor utama yang dapat menjelaskan rendahnya angka anak yang berhasil kembali ke sekolah adalah ketidaksesuaian sistem yang

digunakan dalam verifikasi data. Dinas Pendidikan saat ini menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk melakukan verifikasi, sementara aplikasi yang lebih relevan untuk menangani permasalahan ini adalah PASTI BERAKSI. Dapodik sendiri tidak dirancang secara khusus untuk memantau status anak yang berisiko atau sudah tidak melanjutkan pendidikan, sehingga mungkin tidak memberikan gambaran yang akurat terkait kebutuhan intervensi yang lebih mendalam. Aplikasi PASTI BERAKSI, yang lebih terfokus pada deteksi dan penanganan kasus Anak Tidak Sekolah dan Anak Beresiko Putus Sekolah, seharusnya lebih efektif dalam mengidentifikasi dan memonitor kondisi tersebut. Ketidaksesuaian data yang tercatat antara Dapodik dan PASTI BERAKSI berpotensi menjadi hambatan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan berfokus pada efektivitas Tim dalam koordinasi pelaksanaan program Penanganan ATS di Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti ini juga akan mengidentifikasi dan memastikan optimalnya kolaborasi antara Tim PPATS Serta pihak terkait untuk memastikan anak dan remaja yang belum menyelesaikan Pendidikan 12 tahun tertangani dengan baik serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia, mulai dari pendataan sampai ke Pengembalian ATS untuk kembali ke Bangku sekolah.

Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PP-ATS) selaras dengan program prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025,

khususnya di bidang penguatan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan akses pendidikan inklusif dan berkualitas.

Selain itu penulis juga tertarik untuk meneliti kinerja tim koordinasi pencegahan penanganan anak tidak sekolah karena sebelumnya sudah ada penelitian terkait Namun bukan di daerah Sulawesi Selatan tetapi di Magelang yang diteliti oleh Ririn Hidayanti salah satu Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2019 terkait implementasi Program penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Magelang.

Hasil dari penelitian Sebelumnya ini menunjukkan implementasi program Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Magelang dilihat dari aspek komunikasi melalui dua tahap yaitu komunikasi antar pelaksana dan komunikasi dengan sasaran program; segi sumber daya didukung dengan ketersediaan SDM, fasilitas, tetapi memiliki kekurangan pada anggaran, disposisi yang dimiliki Tim PATS sudah baik; struktur birokrasi dengan dibentuk tim PATS yang bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam SK, Praktik pelaksanaan implementasi program PATS di Desa Banyusidi mengalami hambatan pada tahap konfirmasi dan pengembalian ATS, Praktik pelaksanaan implementasi program PATS di Desa Kembanglimus sudah mampu melaksanakan program dengan baik. Adapun Pembaharuan dari Penelitian saya yaitu bagaimana Tim Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah dalam menangani Anak tidak sekolah yang dimulai dari Pendataan, hingga anak ATS kembali ke bangku sekolah.

Adapun Pembaharuan dari penelitian sekarang yaitu, penelitian yang diusulkan pada proposal tesis ini bertujuan untuk memberikan pembaharuan dari penelitian sebelumnya yang dimana GAP penelitian yang diidentifikasi adalah berfokus pada bagaimana Tim Koordinasi Pencegahan penangan anak tidak sekolah (PPATS) di Provinsi Sulawesi Selatan menangani anak tidak sekolah dimulai dari pendataan hingga anak ATS kembali kebangku sekolah, secara lebih spesifik GAP penelitian ini terletak pada fokus wilayah geografis dimana penelitian terdahulu berlokasi di Kabupaten Magelang, sedangkan penelitian ini berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan, perbedaan lokasi ini penting karena kondisi, kebijakan daerah, dan karakter masalah ATS bisa berbeda antar wilayah.

Cakupan dan tahapan penanganan dimana penelitian terdahulu menyoroti implementasi program secara umum dan mengidentifikasi hambatan pada tahapan konfirmasi dan pengembalian ATS, Namun penelitian yang sekarang akan lebih mendalam dengan melihat efektivitas kinerja Tim Koordinasi pada seluruh tugas dan fungsi serta tahapan penangan ATS, mulai dari pendataan, verifikasi data, hingga pengembalian ATS ke bangku sekolah. dari segi aspek kolaborasi dan optimalisasi SDM, proposal tesis ini secara eksplisit ingin mengidentifikasi dan memastikan optimalnya kolaborasi antar Tim PPATS dan pihak terkait, serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Ini mencakup kendala seperti Dinas Pendidikan yang masih kewalahan dalam verifikasi data (hanya sekitar 9% terverifikasi) dan kolaborasi antar OPD yang belum optimal

dalam hal SDM pengelola ATS. Hal ini menjadi penekanan yang lebih kuat dibandingkan penelitian terdahulu yang hanya menyebutkan ketersediaan SDM tetapi kekurangan anggaran dan Sistem Verifikasi Data: Penelitian ini secara khusus menyoroti masalah ketidaksesuaian sistem verifikasi data yang digunakan (Dapodik vs. PASTI BERAKSI) yang menjadi salah satu faktor rendahnya angka anak yang kembali ke sekolah. Aspek ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam hasil penelitian terdahulu

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “Efektivitas Kinerja Tim Koordinasi Pencegahan Penanganan Anak Tidak sekolah (PPATS) Provinsi Sulawesi Selatan”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka fokus masalah yang penulis angkat ialah Bagaimana Efektivitas Kinerja Tim Koordinasi Pencegahan Penanganan Anak Tidak Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan dapat bekerja secara efektif.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas kinerja Tim Koordinasi Pencegahan Penanganan Anak Tidak sekolah Provinsi Sulawesi selatan dapat bekerja secara efektif untuk membantu menekan penurunan angka anak tidak sekolah (ATS).

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Dari segi manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan efektifitas kinerja Tim Koordinasi Percepatan Penanganan Anak Tidak sekolah Provinsi Sulawesi Selatan yang berdampak pada penurunan angka anak tidak sekolah.

2. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur (MSDMA) yang berkaitan dengan manajemen organisasi maupun manajemen kinerja untuk mencapai tujuan pembangunan SDM yang unggul melalui pendidikan.